



Pengaruh Efektivitas Pengawasan Internal, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Jayapura)

Alfred Magay^{1*}, Arni Karina¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional

*Corresponding Author's e-mail: Alfredmagay24@gmail.com

Article History:

Received: September 2, 2025

Revised: September 26, 2025

Accepted: September 30, 2025

Keywords:

internal supervision, budget planning, accounting system implementation, local government financial performance

Abstract: This study aims to empirically examine the influence of the effectiveness of internal supervision, budget planning, and the implementation of accounting systems on the financial performance of local governments. The background of this research is rooted in the importance of accountable and transparent regional financial management that is oriented toward achieving local development goals. The financial performance of local governments is influenced not only by technical factors related to budget implementation but also by the quality of internal supervision and the adequacy of the accounting systems applied. This study employs a quantitative approach, collecting data through questionnaires and analyzing the results using multiple linear regression tests. The findings reveal that: (1) the effectiveness of internal supervision has a negative and significant impact on the financial performance of local governments, as indicated by a $t\text{-value} < t\text{-table}$ ($-3.114 < 2.011$) and a significance level of $0.03 < 0.05$. This suggests that overly strict internal supervision can hinder budget implementation flexibility, ultimately reducing financial performance; (2) budget planning has a positive and significant effect on financial performance, supported by a $t\text{-value} > t\text{-table}$ ($5.075 > 2.011$) and a significance level of $0.00 < 0.05$, indicating that higher-quality budget planning leads to more optimal financial outcomes; and (3) the implementation of accounting systems also positively and significantly affects financial performance, with a $t\text{-value} > t\text{-table}$ ($3.424 > 2.011$) and a significance level of $0.01 < 0.05$, showing that proper accounting system implementation can enhance the accuracy, efficiency, and accountability of local financial reporting. Overall, the study confirms that the financial performance of local governments results from a complex interaction between supervision, planning, and the accounting systems employed.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Magay, A., & Karina, A. (2025). Pengaruh Efektivitas Pengawasan Internal, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Jayapura). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 2125–2137. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4560>

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau yang biasa dikenal dengan istilah otonomi daerah. Hal ini di atur dalam TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah kemudian direvisi menjadi Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sejak di berlakukannya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah dituntut agar dapat memberikan pertanggungjawabannya atas Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan hasil Pemeriksaan menunjukkan masih adanya permasalahan utama yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan, yaitu terdapat realisasi belanja senilai Rp1,57 triliun yang melampaui anggaran induk dengan rincian yaitu Belanja Barang dan Jasa senilai Rp403,70 miliar, Belanja Hibah senilai Rp437,44 miliar, Belanja Bantuan Sosial senilai Rp27,54 miliar, Belanja Modal senilai Rp566,11 miliar, dan Belanja Tidak Terduga senilai Rp141,02 miliar. Atas pelampauan realisasi belanja tersebut Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Anggaran Perubahan sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, namun penetapan peraturan gubernur tersebut tidak melalui persetujuan bersama DPRD dan pengesahan Menteri Dalam Negeri serta pelaksanaan dan substansi belanja tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kriteria antara lain yaitu keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*papua.bpk.go.id.*)

Kasus serupa terjadi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan penjelasan atas hasil laporan keuangannya untuk tahun anggaran 2012 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan 65 temuan yang berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp 154,55 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI yang mencapai Rp 41 triliun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap belum menerapkan kebijakan penyisihan piutang dan penyusunan aset tetap, serta potensi konsekuensi putusan Mahkamah Agung atas sengketa dengan pihak swasta. (www.nasional.kompas.com. dalam Arni Karina, 2019). Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2008 – 2012 adalah baik bila dilihat dari kategori rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas, serta rasio pertumbuhan. Sedangkan untuk rasio efisiensi tidak baik (Arni Karina, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh pengawasan, pengawasan internal dapat menilai apakah seluruh aktivitas yang berjalan sudah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan dan setiap elemen yang berkaitan dengan tujuan organisasi memiliki kualitas dan potensi. Segala aktivitas yang sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan dapat mengukur kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Meningkatnya kinerja pegawai pada dasarnya lebih ditentukan oleh bagaimana seorang pimpinan mampu mengendalikan pelaksanaan kerja dari para pegawai (Arni Karina, 2018). Penelitian serupa dilakukan oleh Novita Lerly Djiloy, (2016), Dari hasil penelitian yang diperoleh, variabel pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SKPD.

Perencanaan anggaran yang baik juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik, Studi kasus yang terjadi di Puskesmas Gegerbitung Tahun 2017 – 2019 oleh Rini Nuraeni dan Asep Suryana, SE., M.Ak, (2020). Pada tahun 2017

Perencanaan Anggaran Puskesmas Gegerbitung mengalami kenaikan dan penurunan. Bulan Januari – Februari mengalami penurunan sedikit sebesar 3%. Pada bulan Maret sampai bulan April mengalami kenaikan. Dan pada Bulan Mei sampai dengan bulan Juli kembali mengalami penurunan. Dan pada bulan Agustus mulai mengalami kenaikan lagi. Lalu pada bulan Agustus sampai dengan Desember mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 Perencanaan Anggaran Puskesmas Gegerbitung mengalami kenaikan dan penurunan. Bulan Januari – April mengalami penurunan. Pada bulan Mei – Juli mengalami kenaikan signifikan sebesar 186%. Pada bulan Agustus mengalami penurunan. Bulan September – Desember mengalami kenaikan signifikan sebesar 60%. Pada tahun 2019 Perencanaan Anggaran Puskesmas Gegerbitung mengalami kenaikan dan penurunan. Pada bulan Januari ke bulan Februari terjadi kenaikan yang sangat signifikan sebesar 3139%. Pada bulan maret sampai meimengalami kenaikan lagi sebesar 139%. Pada bulan Juni mengalami penurunan lagi. Lalu pada bulan Juli sampai Desember mengalami kenaikan yg signifikan sebesar 196%.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah di lakukan dapat di simpulkan bahwa Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan pada Puskesmas Gegerbitung Kabupaten Sukabumi tahun 2017 – 2019. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Novita Lerly Djiloy, (2016), Dari hasil penelitian yang diperoleh, variable perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan anggaran yang baik di pengaruhi dengan kinerja keuangan baik.

Selain pengawasan internal dan perencanaan anggaran, kinerja pemerintah juga di pengaruhi oleh sistem akuntansi, dimana tata kelola pelaksanaan Pemerintah yang baik dari suatu negara merupakan suatu keharusan yang tidak dapat di abaikan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik untuk menjalankan roda Pemerintahan, salah satunya yaitu kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan. Untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik menjadi alasan mengapa Pemerintahan Republik Indonesia melakukan Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi keuangan, dalam pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan peranan pengawasan internal yang memadai yaitu dari atasan langsung kepada bawahannya. Pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Sukmana dan Anggarsari, 2009 dalam Novita Lerly Djiloy, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penelitian bermaksud untuk mengetahui : (1) Apakah Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah? (2) Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah? (3) Apakah Pelaksanaan Sistem Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

LANDASAN TEORI

Stewardship Teori

Stewardship Teory adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan

meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya. (Donaldson dan Davis, 1989, 1991 dalam Anton, F. X. 2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi, 1986: 199 dalam Angin, D. B. P., & Hasibuan, M. Z. 2021).

Pengawasan Internal

Menurut COSO (2013) dalam Hastuti, H., Burhany, D. I., Rufaedah, Y. R., Mai, M. U., & Rochendi, H. R. (2021) mendefinisikan pengendalian internal adalah: “Sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan”. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai: “Proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. Sedangkan menurut Sawyer et al. (2012), pengendalian intern adalah penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai.

Perencanaan Anggaran

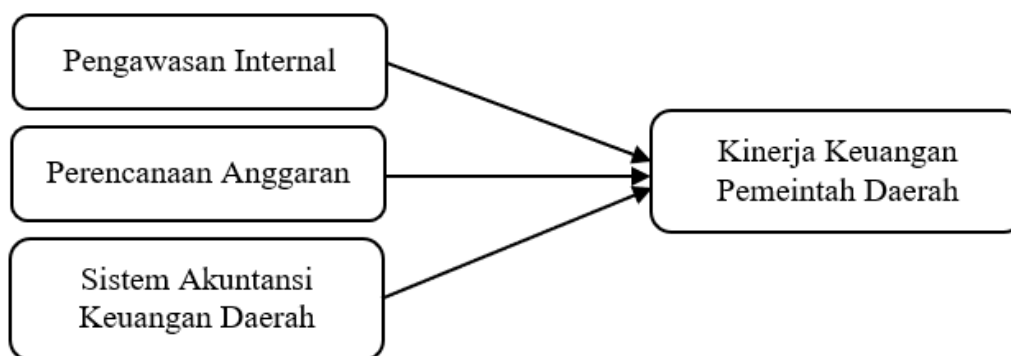
Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan (planning) merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Bastian, 2010: 165 dalam Sudastri, D. 2016).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 diganti Permendagri No. 59 Tahun 2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah: “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. (Jumardi, J. 2021)

Kerangka Analisis

Berikut ini merupakan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Analisis

Hipotesis

H¹ : Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H² : Perencanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

H³ : Sisitem Akuntuntasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan pegawai SKPD terkait. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber langsung dari jawaban responden atas kuesioner yang telah disusun peneliti. Populasi penelitian mencakup 15 SKPD di Pemerintah Kota Jayapura, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu Kepala Dinas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang telah menduduki jabatan minimal satu tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 4 responden dari masing-masing SKPD sehingga total sampel penelitian adalah 60 responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji regresi linier berganda dengan persamaan: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$, di mana Y merupakan kinerja keuangan pemerintah daerah, X₁ efektivitas pengendalian internal, X₂ perencanaan anggaran, X₃ sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan e adalah error. Analisis ini diawali dengan uji statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian dan profil demografi responden. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi guna memastikan kelayakan model regresi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi (R²) untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, uji statistik F untuk menguji kelayakan model

secara simultan, serta uji statistik t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Deskriptif Statistik memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi pada data yang digunakan dalam penelitian.

1. Deskriptif Efektivitas Pengawasan Internal

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Efektivitas Pengawasan Internal

Pernyataan	Tanggapan Responden					Jumlah
	Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
	5	4	3	2	1	
Pernyataan 1	14	21	17	0	0	52
Pernyataan 2	16	18	18	0	0	52
Pernyataan 3	15	19	18	0	0	52
Pernyataan 4	17	17	18	0	0	52
Pernyataan 5	16	19	17	0	0	52
Pernyataan 6	16	18	18	0	0	52
Pernyataan 7	13	20	19	0	0	52
Pernyataan 8	15	19	18	0	0	52
Pernyataan 9	18	17	17	0	0	52
Jumlah	140	168	160	0	0	468
Presentase	29,91%	35,90%	34,19%	0,00%	0,00%	100,00%

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan banyaknya frekuensi jawaban Setuju yaitu 35,90% yang berarti jawaban setuju paling banyak dipilih oleh responden untuk variabel Efektivitas Pengawasan Internal yang disajikan berdampak positif sehingga hasil penelitian dapat maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Deskriptif Perencanaan Anggaran

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Perencanaan Anggaran

Pernyataan	Tanggapan Responden					Jumlah
	Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
	5	4	3	2	1	
Pernyataan 1	12	23	17	0	0	52
Pernyataan 2	18	22	12	0	0	52
Pernyataan 3	18	23	11	0	0	52
Pernyataan 4	15	20	17	0	0	52
Pernyataan 5	15	19	18	0	0	52
Pernyataan 6	17	15	20	0	0	52
Pernyataan 7	15	19	18	0	0	52
Pernyataan 8	15	19	18	0	0	52
Jumlah	125	160	131	0	0	416
Presentase	30,05%	38,46%	31,49%	0,00%	0,00%	100,00%

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan banyaknya frekuensi jawaban Setuju yaitu 38,46% yang berarti jawaban setuju paling banyak dipilih oleh responden untuk variabel Perencanaan Anggaran yang disajikan berdampak positif sehingga hasil penelitian dapat maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Deskriptif Sistem Akuntansi Keuangan

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Sistem Akuntansi Keuangan

Pernyataan	Tanggapan Responden					Jumlah
	Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
	5	4	3	2	1	
Pernyataan 1	15	19	18	0	0	52
Pernyataan 2	20	21	11	0	0	52
Pernyataan 3	15	18	19	0	0	52
Pernyataan 4	16	19	17	0	0	52
Pernyataan 5	23	15	14	0	0	52
Pernyataan 6	14	23	15	0	0	52
Pernyataan 7	16	25	11	0	0	52
Pernyataan 8	18	23	11	0	0	52
Pernyataan 9	15	21	16	0	0	52
Pernyataan 10	18	18	16	0	0	52
Pernyataan 11	18	22	12	0	0	52
Pernyataan 12	15	20	17	0	0	52
Pernyataan 13	18	18	16	0	0	52
Pernyataan 14	19	15	18	0	0	52
Pernyataan 15	17	16	19	0	0	52
Jumlah	137	163	116	0	0	416
Presentase	32,93%	39,18%	27,88%	0,00%	0,00%	100,00%

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan banyaknya frekuensi jawaban Setuju yaitu 39,18% yang berarti jawaban setuju paling banyak dipilih oleh responden untuk variabel system akunatasi keuangan yang disajikan berdampak positif sehingga hasil penelitian dapat maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Deskriptif Kinerja Keuangan

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kinerja Keuangan

Pernyataan	Tanggapan Responden					Jumlah
	Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
	5	4	3	2	1	
Pernyataan 1	18	18	16	0	0	52
Pernyataan 2	19	19	14	0	0	52
Pernyataan 3	17	18	16	1	0	52
Pernyataan 4	13	23	16	0	0	52
Pernyataan 5	16	24	11	1	0	52

Pernyataan 6	19	23	10	0	0	52
Jumlah	102	125	83	2	0	312
Presentase	32,69%	40,06%	26,60%	0,64%	0,00%	100,00%

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

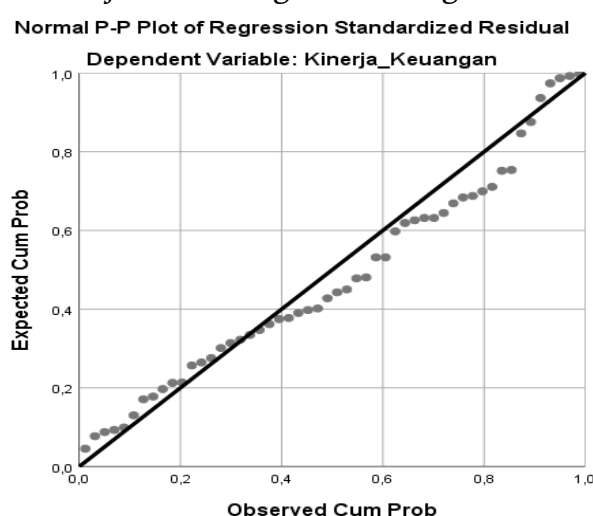
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan banyaknya frekuensi jawaban Setuju yaitu 40,06% yang berarti jawaban setuju paling banyak dipilih oleh responden untuk variabel kinerja keuangan yang disajikan berdampak positif sehingga hasil penelitian dapat maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji auto korelasi.

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas disajikan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

Berdasarkan gambar di atas, data menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengawasan_Internal	,135	7,394
	Perencanaan_Anggaran	,114	8,770
	Sistem_Akuntansi	,153	6,522

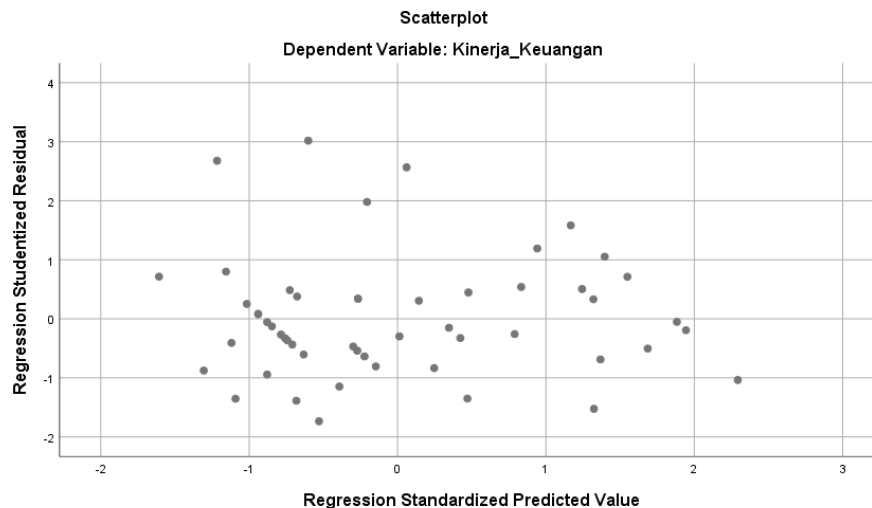
a. Dependent Variable: Kinerja_Keuangan

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

Berdasarkan tabel di atas, setiap variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3. Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4. Uji Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2,656	1,406		1,889	,065
	Pengawasan_Internal	-,305	,098	-,493	-3,114	,003
	Perencanaan_Anggaran	,652	,129	,875	5,075	,000
	Sistem_Akuntansi	,193	,056	,510	3,427	,001

a. Dependent Variable: Kinerja_Kuangan

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = 10,135 + 0,241X_1 + 0,118X_2 + 0,278X_3$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

X₁ = Efektifitas Pengawasan Internal

X₂ = Perencanaan Anggaran

X₃ = Sistem Akuntansi Keuangan

5. Hasil Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,915 ^a	,837	,827	1,15090

a. Predictors: (Constant), Sistem_Akuntansi, Pengawasan_Internal, Perencanaan_Anggaran
b. Dependent Variable: Kinerja_Kuangan

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,837. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, perencanaan anggaran dan system akuntansi keuangan memberikan kontribusi sebesar 83,7% dalam mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan 16,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

b. Uji F

Berikut ini disajikan hasil uji f.

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	327,093	3	109,031	82,314	,000 ^b
Residual	63,580	48	1,325		
Total	390,673	51			

a. Dependent Variable: Kinerja_Kuangan

b. Predictors: (Constant), Sistem_Akuntansi, Pengawasan_Internal, Perencanaan_Anggaran

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 82,314 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini bersifat layak karena efektivitas pengendalian internal, perencanaan anggaran dan system akuntansi keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

c. Uji t (Uji Parsial)

Berikut ini disajikan hasil uji t (uji parsial).

Tabel 9. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	2,656	1,406		1,889 ,065
	Pengawasan_Internal	-,305	,098	-,493	-3,114 ,003
	Perencanaan_Anggaran	,652	,129	,875	5,075 ,000
	Sistem_Akuntansi	,193	,056	,510	3,427 ,001

a. Dependent Variable: Kinerja_Kuangan

(Sumber: Data diolah oleh penulis 2023)

Dengan menggunakan derajat kebebasan ($df = n - k - 1$, sehingga $df = 52 - 3 - 1 = 48$) dan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ maka diperoleh nilai t Tabel sebesar 2,011.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut.

1. Nilai t hitung efektivitas pengawasan internal sebesar -3,114 lebih kecil daripada nilai t tabel sebesar 2,011 ($-3,114 < 2,011$) dan berada pada nilai signifikan sebesar 0,003 yang lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota jayapura.
2. Nilai t hitung perencanaan anggaran sebesar 5,075 lebih besar daripada nilai t tabel sebesar 2,011 ($5,075 > 2,011$) dan berada pada nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota jayapura.
3. Nilai t hitung perencanaan anggaran sebesar 3,427 lebih besar daripada nilai t tabel sebesar 2,011 ($3,427 > 2,011$) dan berada pada nilai signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa system akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kota jayapura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Arens, Elder, dan Beasley (2017) yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal memang penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan, namun apabila penerapannya terlalu kaku dan berlebihan justru dapat memperlambat proses pengambilan keputusan serta mengurangi fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan kata lain, pengawasan internal yang terlalu dominan berpotensi menciptakan birokrasi yang panjang sehingga menghambat kinerja keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan internal harus dilaksanakan secara proporsional—cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan, tetapi tetap fleksibel agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak terhambat.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini diperkuat oleh pendapat Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran yang baik mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah karena setiap kegiatan dan belanja sudah diarahkan pada sasaran yang jelas. Selain itu, menurut Mahmudi (2016), anggaran yang disusun dengan memperhatikan prinsip partisipatif, transparan, dan berbasis kinerja akan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin baik kualitas perencanaan anggaran di SKPD, maka semakin besar pula peluang tercapainya kinerja keuangan yang optimal.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Nordiawan dan Hertianti (2010) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi sektor publik merupakan instrumen penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, menurut Bastian (2015), penerapan sistem akuntansi yang baik akan mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena laporan keuangan yang disajikan lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan. Hal ini menjelaskan bahwa keberhasilan SKPD dalam mengimplementasikan sistem akuntansi secara konsisten akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang ada, sebab penerapan pengawasan internal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Jayapura belum berjalan secara optimal sehingga berdampak pada kurangnya efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, perencanaan anggaran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, yang berarti semakin baik kualitas perencanaan anggaran, maka semakin meningkat pula kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura. Selain itu, penerapan sistem akuntansi keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik implementasi sistem akuntansi keuangan, semakin baik pula kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura. Dengan demikian, perencanaan anggaran dan sistem akuntansi menjadi faktor kunci yang mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah, sementara pengawasan internal perlu ditingkatkan efektivitasnya agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan.

DAFTAR REFERENSI

1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2010). *Codification of statements on auditing standards*. New York: AICPA.
2. Anton, F. X. (2010). Menuju teori stewardship manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2).
3. Bastian, I. & Soepriyanto. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
4. Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
5. Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commision (COSO). (2013). *Internal Control Integrated Frame Work*. New York: AICPA.
6. Djiloy, N. L. (2016). Pengaruh pengawasan intern, perencanaan, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja skpd pemerintah daerah kabupaten sigi. *Katalogis*, 4(6).
7. Indriantoro dan B, Supomo. (2002). Edisi Satu. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
8. Karina, A., & Tjou, C. B. (2018). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga). *AkunNas*, 15(2).
9. Karina, A., & Noerainy, D. (2019). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *AkunNas*, 13(1).
10. Kuncoro, E. D. (2013). Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas PU Provinsi Kaltim. *Journal Of Accounting*, 4, 364–373.
11. Ibnu Syamsi. (1986). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.

12. Sanusi, A. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
13. Siregar, S. (2013). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
14. Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
15. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.